

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2022

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KENDARI

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berdasarkan Perka BNN No. 8/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sakip di Lingkungan BNN. RKT merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja unit kerja dalam 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran. Indikator kinerja unit kerja vertikal menggambarkan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi di Wilayah kerjanya. Dengan demikian penyusunan Renja Kinerja berpedoman pada Renstra Badan Narkotika Nasional (BNN). Terkait dengan ini, maka Rencana Kinerja BNN Kota Kendari Tahun 2022 disusun sebagai dasar Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari tahun 2022.

Pada rencana Kinerja ini disusun kegiatan yang bersifat program/kegiatan lanjutan, juga terdapat program/kegiatan prioritas yang berorientasi pada percepatan pencapaian visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Dengan adanya Rencana Kinerja ini, diharapkan para pelaksana kegiatan dapat melaksanakan kegiatan secara terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan publik.

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2022 ini dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kepala BNN Kota Kendari



Dra. Murniaty M., MPH., Apt

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari menunjukkan capaian yang sangat nyata. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi sebagai berikut:

a) Problematika pengawasan peredaran

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut :

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di Lembaga masyarakat;
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap Narkoba pada jalur tidak resmi.

b) Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
- 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
- 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat

sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.

- 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c) Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih di bawah target.
- 2) Masih banyak pecandu narkoba yang *relaps* setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
- 3) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan *assessment* penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
- 4) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

d) Hasil Evaluasi

Evaluasi Renja BNN Kota Kendari tahun 2021 dan pencapaian Renstra tahun 2021 disajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.

Rekapitulasi Realisasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome / Output)	T a r g e t Kinerja Capaian Program	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	54,79	107,43
2		Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	81,34	103,39
3		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,33	104,06
4		Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-	0	-
5		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	2	200,00
			Lembaga			
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100,00
			Unit			
6		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Kendari	3,2	3,65	114,06
7		Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	1	100,00
			Berkas	Berkas		
8		Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Kendari	90	86,25	95,83
9		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) BNN Kota Kendari	94	97,68	103,91

Kinerja BNN Kota Kendari Tahun 2021 diukur berdasarkan 9 (Sembilan) indikator kinerja program (IKP) yang telah ditandatangani dalam ketetapan kinerja Tahun 2021 yakni:

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba;
2. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba;
3. Indeks Kemandirian Parsipasi;

4. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional;
5. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM;
6. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Kendari;
7. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21
8. Nilai Kinerja anggaran BNN Kota Kendari;
9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kendari.

Cara pengukuran kinerja BNN Kota Kendari dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kegiatan tahun 2021 dengan target rencana strategi (Renstra) tahun 2022. Hasil pencapaian kinerja BNN sejak tahun 2021 dan estimasi rencana pencapaian kinerja pada tahun 2022 disajikan pada tabel 2 berikut ini.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
7. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsidan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BNN KOTA KENDARI

TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Kota Kendari menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Kendari sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Kendari. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Kendari Tahun 2022 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10 Orang	70.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	- 5 Keluarga - 3 Desa	108.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	192.025.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)		
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	12.600.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	390 Orang	142.480.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	4 Lembaga	19.325.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP		
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)		
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Perkara	50.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)		
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan		
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	3 Orang	11.775.000
10.	Penyidikan	Meningkatnya	Jumlah berkas		

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNk	2 Dokumen	13.860.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	12 Layanan	83.703.000
			Nilai IKPA mencapai target	1 Dokumen	17.948.000
13	Penyelenggaraan Ketatausahaan, rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	14 Layanan	1.015.104.000
			Indeks kualitas pengadaan dan Pengelolaan Barang/jasa	2 Unit	11.000.000
14	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokolern yang optimal	- Indeks layanan kehumasan - Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokolern	1 Layanan	20.000.000
15	Pengembangan Organisasi, tatalaksana dan Sumber Daya manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	- Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian (skala 4) - Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	37 Orang	22.280.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Kendari Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Kendari tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Kendari selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran. serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Kendari
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	3 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	1 Klmpk Masyarakat
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	1 Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkoba	
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba	
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	3 Orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Bulan
13	Penyelenggaraan Ketatausahaan, rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum yang maksimal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14 Layanan
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Unit
14	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	- Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan
15	Pengembangan Organisasi, tatalaksana dan Sumber Daya manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	- Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian (skala 4) - Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	37 Orang